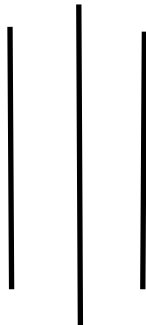




**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024**

KECAMATAN SIANTAR BARAT



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, petunjuk dan perlindungan-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Kecamatan Siantar Barat ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 tentang kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Kota Pematang Siantar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Kecamatan Siantar Barat selama Tahun Anggaran 2024.

Pematang Siantar, Januari 2025
CAMAT SIANTAR BARAT



HERWAN AR. SARAGIH, SH
PENATA TK I
NIP. 19711225 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Dasar Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Siantar Barat.....	1
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk.....	4
d. Jumlah Kelurahan.....	6
e. Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Siantar Barat.....	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan.....	12
a. Permasalahan Strategis.....	12
b. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
c. Arah Kebijakan dan Rencana Strategis.....	15
d. Program Pembangunan Berdasarkan Renja.....	17
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	18
BAB II CAPAIAN KINERJA SKPD	20
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantar Barat Tahun 2024.....	20
2.1.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	20
2.2 Akuntabilitas Kinerja SKPD.....	21
2.2.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	21
2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
2.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	24
2.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Renstra..	25
2.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	25
2.2.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Target Kinerja.....	27
2.2.7 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran.....	30
BAB III PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. DASAR HUKUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN Siantar Barat

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar diselenggarakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
11. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematang Siantar.

b. Data Geografis Wilayah

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dipedomani oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota maka melalui Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 388 Tahun 2001 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, istilah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar berubah menjadi Kota Pematang Siantar.

Sampai saat ini Kecamatan Siantar membawahi 8 (delapan) Kelurahan dengan total luas wilayah 3.205 km² (4,01% dari luas wilayah Kota Pematang Siantar), yang terdiri dari:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Kelurahan Dwikora dengan luas wilayah | : 0,22 km ² |
| 2. Kelurahan Proklamasi dengan luas wilayah | : 0,385 km ² |
| 3. Kelurahan Teladan dengan luas wilayah | : 0,360 km ² |
| 4. Kelurahan Banjar dengan luas wilayah | : 0,360 km ² |
| 5. Kelurahan Bantan dengan luas wilayah | : 0,680 km ² |
| 6. Kelurahan Simarito dengan luas wilayah | : 0,420 km ² |
| 7. Kelurahan Sipinggol-pinggol dengan luas wilayah | : 0,370 km ² |
| 8. Kelurahan Timbang Galung dengan luas wilayah | : 0,375 km ² |

Kecamatan Siantar Barat mempunyai batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Sebelah Utara | : Berbatasan dengan kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara |
| b. Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan |
| c. Sebelah Timur | : Berbatasan dengan kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur |

- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari

Kecamatan Siantar Barat berada di pusat kota Pematng Siantar, terletak pada ketinggian 400-410 m di atas permukaan laut, dengan bentuk wilayah dataran dan berbukit-bukit, beriklim sedang (sub tropis) dengan suhu rata-rata 23°C-32°C/tahun.

Tabel 1.1
Letak Geografis Ketinggian dari permukaan laut
Dirinci menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Letak Geografis		Ketinggian		
		Pantai	Bukan Pantai	<500	500-700	700+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dwikora	-	✓	✓	-	-
2	Proklamasi	-	✓	✓	-	-
3	Teladan	-	✓	✓	-	-
4	Banjar	-	✓	✓	-	-
5	Bantan	-	✓	✓	-	-
6	Simarito	-	✓	✓	-	-
7	Sippinggol-pinggol	-	✓	✓	-	-
8	Timbang Galung	-	✓	✓	-	-

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Barat

c. Jumlah Penduduk

Kecamatan Siantar Barat merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang heterogen dan majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama dengan jumlah penduduk 37.439. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat strategis dengan luas wilayah sebesar 3.205 km yang merupakan wilayah perlintasan mobilitas penduduk ke daerah lain seperti ke Parapat, Tarutung, Tanah Karo, Tebing Tinggi dan Medan.

a. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, jumlah penduduk Kecamatan Siantar Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan
Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dwikora	1.452	1.737	3.189
2	Proklamasi	1.150	1.132	2.282
3	Teladan	1.648	1.678	3.326
4	Banjar	2.999	3.153	6.152
5	Bantan	6.935	8.183	15.118
6	Simarito	2.662	2.716	5.378
7	Sipinggol-pinggol	1.468	1.418	2.886
8	Timbang Galung	2.365	2.493	4.858
Jumlah				43.189

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Barat

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah kelurahan Bantan dengan jumlah penduduk sebanyak 15.118 jiwa dan penduduk yang paling sedikit berada di kelurahan Proklamasi sebanyak 2.282 jiwa.

b. Klasifikasi Penduduk berdasarkan Agama

Adapun sarana ibadah menurut kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Barat dapat dilihat dalam daftar tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Ibadah menurut Kelurahan
Tahun 2024

No	Kelurahan	Agama					
		Mesjid	Langgar	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng
1	Dwikora	1	0	2	0	1	2
2	Proklamasi	4	0	2	0	1	0
3	Teladan	3	3	4	0	0	0
4	Banjar	2	1	1	0	0	1
5	Bantan	9	1	0	0	0	0
6	Simarito	5	1	0	0	0	0
7	Sipinggol- pinggol	4	0	2	0	0	0
8	Timbang Galung	3	1	1	0	1	0
Jumlah		31	7	12	0	3	3

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Barat

d. Jumlah Kelurahan

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota Pematang Siantar yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota termasuk menangani sebagian urusan penunjang pemerintahan sedangkan kelurahan merupakan perangkat daerah Kota Pematang Siantar yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Dimana Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Selain itu seorang Lurah juga melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Sampai saat ini Kecamatan Siantar membawahi 8 (delapan) Kelurahan dengan total luas wilayah 3.205 km² (4,01% dari luas wilayah Kota Pematang Siantar), yang terdiri dari:

1. Kelurahan Dwikora
2. Kelurahan Proklamasi
3. Kelurahan Teladan
4. Kelurahan Banjar
5. Kelurahan Bantan
6. Kelurahan Simarito
7. Kelurahan Sippinggol-pinggol
8. Kelurahan Timbang Galung

Dalam melaksanakan pemerintahan di Kecamatan Siantar Barat didukung juga oleh Kepala Lingkungan, RW, dan RT dari tiap-tiap Kelurahan. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah RT, RW dan Lingkungan

Menurut Kelurahan Tahun 2024

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Lingkungan	RW	RT
1	Dwikora	0,255	2	5	20
2	Proklamasi	0,385	2	6	18
3	Teladan	0,360	2	4	10
4	Banjar	0,360	2	8	17
5	Bantan	0,680	2	10	41

6	Simarito	0,420	3	8	26
7	Sipinggol-pinggol	0,370	2	11	26
8	Timbang Galung	0,375	2	7	21
Jumlah			17	59	179

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Barat

e. Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Siantar Barat

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak untuk pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (out put) dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum melaksanakan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya sehingga akan dapat diketahui celah kinerjanya. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jika ditemukan, maka dapat ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Secara garis besar capaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Siantar Barat dapat digambarkan dalam Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada table 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kecamatan Siantar Barat
Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pengelolaan Persampahan	1.461.927.260	1.454.894.204
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	690.830.048	687.140.700

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.336.117.496	7.704.686.377
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.643.506.376	1.542.189.500
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	192.334.831	191.794.000
Total		12.324.716.011	11.580.704.781

Adapun total anggaran belanja Kecamatan Siantar Barat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.324.716.011 dan realisasinya sebesar Rp.11.580.704.781 atau sebesar 93,96%.

Untuk realisasi Anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut.

Tabel 1.6
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kecamatan Siantar Barat
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Capaian Kinerja (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	1.461.927.260	1.454.894.204	99,52%
	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Tertangani	1.461.927.260	1.454.894.204	99,52%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.461.927.260	1.454.894.204	99,52%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	690.830.048	687.140.700	99,47%

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	690.830.048	687.140.700	99,47%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	690.830.048	687.140.700	99,47%
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	8.336.117.496	7.704.686.377	92,43%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.454.300	16.413.100	99,75%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.227.150	8.206.900	99,75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.227.150	8.206.200	99,75%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.064.942.656	6.473.299.072	91,63%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.064.942.656	6.473.299.072	91,63%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		48.384.000	47.025.000	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.384.000	47.025.000	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		185.454.792	184.927.490	99,72%
	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.987.280	14.930.660	99,62%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.384.947	63.148.250	99,63%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31.286.250	31.100.000	99,40%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.997.000	14.993.580	99,98%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	18.799.315	18.755.000	99,76%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.000.000	42.000.000	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0,00%
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	0	0	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.022.215	678.001.081	95,36%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.960.000	6.929.000	99,55%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58.896.600	58.846.881	99,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	645.165.615	612.225.200	94,89%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	309.859.533	305.020.634	98,44%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138.127.500	136.790.134	99,03%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29.620.000	29.398.000	99,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	142.112.033	138.832.500	97,69%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	1.643.506.376	1.542.189.500	93,84%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	1.643.506.376	1.542.189.500	93,84%

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43.506.376	42.189.500	96,97%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.600.000.000	1.500.000.000	93,75%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	192.334.831	191.794.000	99,72%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	192.334.831	191.794.000	99,72%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150.235.166	149.704.600	99,65%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0	0,00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.099.665	42.089.400	99,98%
Total			12.324.716.011	11.580.704.781	93,96%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program dengan realisasi tertinggi terdapat pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan

a. Permasalahan Strategis

Isu Strategis utama yang menjadi tantangan, hambatan, peluang dan kelemahan bagi pemerintah Kecamatan Siantar Barat secara terukur dan terkendali dirumuskan ke dalam isu – isu utama dan Strategis untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan melalui

penentuan, perumusan, perencanaan dan pemilihan berbagai program dan kegiatan. Sehingga inovasi dan solusi atas segala permasalahan dalam mencapai target dan capaian kinerja melalui indikator target kinerja (OutPut/ Out Come) dapat tercapai atau terpenuhi dengan efisien dan efektif dan tepat sasaran.

1. Membuat mekanisme tetap dan prosedur yang sederhana di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan Siantar Barat.
3. Menyerap dan menerima seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat melalui pertemuan secara reguler oleh camat, lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat.
4. Memaksimalkan peran setiap aparat Kecamatan dalam penyelenggaraan setiap tugas dan fungsi Kecamatan terutama pada bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan produktifitas kerja aparat Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kinerja aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan masyarakat dan pemutakhiran data, serta penataan arsip dan inventaris di Kecamatan Siantar Barat.
6. Meningkatkan pembangunan di wilayah Kecamatan Siantar Barat melalui pengembangan ekonomi lokal dan pencarian serta pengembangan potensi wilayah.
7. Mewujudkan lingkungan Kecamatan Siantar Barat yang sehat, bersih dan indah melalui penataan dan penertiban lingkungan

Issu strategis utama yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

b. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kecamatan Siantar Barat

Tujuan 1	Pemutahiran data dalam rangka efektifitas penataan arsip dan inventaris yang lengkap, akurat dan <i>up to date</i>
Sasaran 1	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran 2	Terciptanya pelayanan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.
Tujuan 2	Tercapainya peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Sasaran 1	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
Sasaran 2	Terciptanya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
Tujuan 3	Mengakselerasi semangat kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Sasaran 1	Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan
Sasaran 2	Tercapainya generasi muda yang berahklak
Tujuan 4	Menciptakan eksistensi dan peran serta aktif perempuan dalam pembangunan
Sasaran 1	Tercapainya peningkatan peran perempuan di pedesaan
Sasaran 2	Terciptanya peningkatan kualitas perempuan
Tujuan 5	Meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan secara terpadu
Sasaran 1	Tercapainya peningkatan peransertaaktif masyarakat dalam membangun kelurahan
Sasaran 2	Terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan

Tujuan 6	Mewujudkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan seluruh unsur-unsur tokoh masyarakat pedesaan
Sasaran 1	Tercapainya program perencanaan pembangunan daerah
Sasaran 2	Terlaksananya kegiatan musrenbang Kecamatan dan kelurahan
Tujuan 7	Mewujudkan peningkatan kualitas kebersihan, lingkungan hidup dan masyarakat perkotaan
Sasaran 1	Tercapainya peningkatan kualitas kebersihan masyarakat perkotaan
Sasaran 2	Terciptanya kualitas lingkungan hidup masyarakat perkotaan
Tujuan 8	Mewujudkan peningkatan Partisipasi Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan
Sasaran 1	Tercapainya peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Sasaran 2	Terciptanya Partisipasi aktif Masyarakat dalam Pembangunan

c. Arah Kebijakan Dan Rencana Strategis

NO	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan ATK e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran

		g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan makanan dan minuman, i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah j. Penyediaan jasa pelayanan THL/PNS k. Penyediaan Jasa Sewa/Menyewa	
2.	Sarana dan prasarana aparatur negara	a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Masyarakat	a. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) b. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4.	Masyarakat	Program Pembinaan PKK dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan
5.	Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan terpadu
6.	Petugas Kebersihan, Masyarakat Perkotaan	Penataan Lingkungan Hidup Perkotaan	Peningkatan Kualitas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Perkotaan
7.	Masyarakat	Penyelenggaraan musrenbang	Perencanaan pembangunan daerah
8.	Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat untuk 8 Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kecamatan dan Kelurahan

d. Program Pembangunan Berdasarkan RENJA 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	
			(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	100%	1.461.927.260
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupten/Kota	100%	690.830.048
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.454.300
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.064.942.656
		Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48.384.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	185.454.792
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	711.022.215
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	309.859.533
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tercapainya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	1.643.506,38
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	192.334.831
TOTAL			100%	12.324.716.011

Dalam Rencana Kerja Kecamatan Siantar Barat Tahun 2024, terdapat 5 Program, 10 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.12.324.716.011. Rencana Kerja ini sudah merupakan perpaduan hasil musrembang kecamatan dan kelurahan dengan RKPD kota Pematangsiantar.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal atau yang disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Dalam rangka mewujudkan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip dan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, perlu adanya Standar Pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Siantar Barat adalah sebagai berikut:

- 2.2.1.1. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Kematian
- 2.2.1.2. Pelayanan permintaan Data terkait Pemerintahan Kecamatan
- 2.2.1.3. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris
- 2.2.1.4. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
- 2.2.1.5. Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Nikah
- 2.2.1.6. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 2.2.1.7. Pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Mikro (IUMK)
- 2.2.1.8. Pelayanan pengaduan masyarakat
- 2.2.1.9. Pelayanan pemantauan Pelaksanaan pemberian bantuan pada masyarakat
- 2.2.1.10. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan (persyaratan pendaftaran TNI/POLRI)

Sedangkan untuk penilaian pelayanan di Kecamatan Siantar Barat menggunakan kuisioner atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat. Adapun survey ini menggunakan

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat minimal B dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Ketepatan waktu pelayanan
4. Kewajaran biaya pelayanan
5. Hasil pelayanan
6. Kompetensi petugas dalam pelayanan
7. Perilaku petugas dalam pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan
9. Tindak lanjut pendauan

Adapun kuisioner yang diisi oleh masyarakat akan diinput dalam aplikasi SIKEMAS yang hasilnya berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nantinya akan dilaporkan setiap bulanya sebagai eviden kepala OPD untuk dalam mencapai realisasi nilai IKM.

BAB II

CAPAIN KINERJA SKPD

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantar Barat Tahun 2024

2.1.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
		Persentase Sampah yang Tertangani
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	100%
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3	Meningkatkan Kesehatan Balita Melalui Sedekah Sampah Untuk Stunting	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Persampahan	1.461.927.260	APBD
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	690.830.048	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.336.117.496	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.643.506.376	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	192.334.831	APBD
Total		12.324.716.011	

2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja Sasaran Strategi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator dan satuan pengukurannya, pada umumnya menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	100%	100%
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	92,17
3	Meningkatkan Kesehatan Balita Melalui Sedekah Sampah Untuk Stunting	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pengelolaan Persampahan	1.461.927.260	1.454.894.204
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	690.830.048	687.140.700
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.336.117.496	7.704.686.377
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.643.506.376	1.542.189.500
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	192.334.831	191.794.000
Total		12.324.716.011	11.580.704.781

Berdasarkan survey yang dilakukan selama tahun 2024 yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan memberikan daftar kuisioner secara random kepada masyarakat yang berurusan langsung ke kantor Camat Siantar Barat untuk 205 responden dari 8 kelurahan yang ada di kecamatan siantar barat dengan mengajukan 10 pertanyaan menyangkut tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya Kecamatan Siantar Barat, didapat hasil pengklasifikasian respon dari masyarakat yaitu 205 orang menyatakan tingkat kepuasan atas pelayanan aparaturnya Kecamatan Siantar Barat adalah sangat puas.

2.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Program	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100%	99,26%	100%	99,52%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	99,88%	100%	99,47%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CC	B	B	B
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	58,98%	59%	93,84%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	99,96%	100%	99,72%

Berdasarkan data data capaian target kinerja di atas bahwa capaian target kinerja pada tahun 2024 lebih tinggi dari capaian target kinerja tahun 2023 yaitu pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimana pada tahun 2023 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 58,98% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 93,84%. Ini terjadi karena adanya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu berupa pelatihan ternak lele tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya lembaga pelatihan ternak lele di Kota Pematangsiantar.

2.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Renstra

No.	Sasaran Strategis	Program	TAHUN 2024		TARGET RENSTRA
			TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100%	99,52%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	99,47%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CC	B	B
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	93,84%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	99,72%	100%

2.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Siantar Barat adalah sebagai berikut :

Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Siantar Barat untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Siantar Barat. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target yaitu di atas 80% lebih. Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya, juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor seperti Personal Komputer/PC dan Printer masih terbatas, kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian Kecamatan Siantar Barat terus melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Siantar Barat mempunyai Program kegiatan tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya (Tahun 2023) yaitu sebanyak 5 program kegiatan meliputi:

- a. Program Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pengelolaan Persampahan	1.461.927.260	1.454.894.204
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	690.830.048	687.140.700

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.336.117.496	7.704.686.377
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.643.506.376	1.542.189.500
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	192.334.831	191.794.000
Total		12.324.716.011	11.580.704.781

2.2.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Target Kinerja

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pembersihan Lingkungan di Kecamatan/ Kelurahan	100 %	99,52%

Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan melalui responsifitas terhadap Peningkatan Pengelolaan Sampah adalah sebesar 99,52 % dari 100 % target kinerja. Capaian kinerja dapat dilihat dari Indikator kinerja (out put) yang meliputi antara lain:

1. Terlaksananya Pembersihan Lingkungan di Kecamatan/ Kelurahan
2. Terlaksananya pengkoordiniran kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan, pembersihan parit/selokan dan penggalian sedimen
3. Peningkatan penanganan sampah di wilayah Kecamatan Siantar Barat
4. Terlaksananya kegiatan LISAPIL di Kecamatan Siantar Barat
5. Terlaksananya kegiatan gotong royong di wilayah Kecamatan Siantar Barat
6. Terlaksananya kegiatan LISAPIL (Lihat Sampah, Ambil dan Pilah)

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	99,47 %

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 99,47 %. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja (Out Put) yang meliputi antara lain:

1. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Terbayarnya Honorarium RT, RW, Kepling, PKK, LPM, Posyandu, dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Pelayanan Perangkat Desa/Kelurahan kepada masyarakat.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terciptanya kualitas pelayanan publik yang prima serta meningkatkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian LAKIP Perangkat Daerah	100 %	92,43 %

	partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Daerah Kabupaten/Kota			
--	--	-----------------------	--	--	--

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Siantar Barat adalah sebesar 92,43% dari target capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator kinerja (Out Put) yang meliputi antara lain:

1. Tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
2. Tersusunya dokumen evaluasi perangkat daerah
3. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
4. Tersediaanya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
5. Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor
7. Tersediaanya peralatan rumah tangga
8. Tersediannya bahan logistik kantor
9. Tersediannya barang cetakan dan penggandaan
10. Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis SKPD
11. Tersediaanya jasa surat-menyurat
12. Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13. Terlaksananya pelayanan umum kantor
14. Terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
15. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya
16. Terpeliharannya gedung kantor dan bangunan lainnya

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
	Terciptanya kualitas Pemberdayaan	Program Pemberdayaan	Jumlah Program		

1.	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	93,84 %
----	-------------------------------	-------------------------------	--	-------	---------

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Siantar Barat adalah sebesar 93,84% dari target capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator kinerja (Out Put) antara lain:

1. Terlaksananya musyawarah musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kecamatan
2. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terciptanya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	99,72 %

Capaian Kinerja Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Siantar Barat adalah sebesar 99,72% dari target capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator kinerja (Out Put) yang meliputi antara lain:

1. Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui kegiatan MTQ Kecamatan
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

2.2.7 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sesuai Dokumen Anggaran

Program	Kegiatan	Target		Realisasi
		Target	Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	9000 ton	1.461.927.260	1.454.894.204
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota , serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupten/Kota	100%	690.830.048	687.140.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokum en	16.454.300	16.413.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 orang/ bln	7.064.942.656	6.473.299.072
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 set	48.384.000	47.025.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 paket	185.454.792	184.927.490
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	711.022.215	678.001.081
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 unit	309.859.533	305.020.634
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Keg (Kec dan 8 Kel)	1.643.506.376	1.542.189.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	192.334.831	191.794.000

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SIANTAR BARAT TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						(%)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kec. Siantar Barat	Perda	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	100%	1.461.927.260	99,52%	1.454.894.204	NIHIL	NIHIL	NIHIL
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupten/Kota	100%	690.830.048	99,47%	687.140.700	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Siantar Barat	Perda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.454.300	99,75%	16.413.100			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.064.942.656	91,63%	6.437.299.072	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48.384.000	100,00%	51.765.000			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	185.454.792	93,26%	638.097.515	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	711.022.215	95,36%	678.001.081	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	309.859.533	98,44%	136.640.755	NIHIL	NIHIL	NIHIL
				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Tercapainya Partisipasi	100%	1.643.506,38	93,84%	1.542.184.500	NIHIL	NIHIL	NIHIL

No.	Ururan Pemerinta han	OPD Pelaks ana	Keb ijak an	Program	Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Permasala han	Tindak Lanjut Permasala han	Tindak Lanjut Rekomend asi DPRD
						(%)	(Rp)	(%)	(Rp)			
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Dalam Pembangunan							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	192.334.831	99,72%	191.794.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL						100%	12.324.716.011	93,96%	11.580.704.781			

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH
1.	- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	- Mengusulkan dalam APBD dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pemerintahan
2.	- Keterbatasan jumlah personil - Tidak memadainya kualitas dan kuantitas TPS, dan peralatan kebersihan yang masih kurang	- Mengusulkan penambahan personil dan menempatkan dan mendistribusikannya pada lokasi-lokasi di seluruh wilayah. - Melakukan analisa mendalam terhadap tingkat kebutuhan TPS dan sarana Prasarana Kebersihan dan mengusulkan melalui APBD untuk mengadakannya.
3.	- Kurangnya kesadaran masyarakat	- Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. - Membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. - Bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kemasyarakatan.

BAB III

PENUTUP

Penyusunan, Pembuatan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, yang dalam hal ini disebut LPPD Kecamatan Siantar Barat Tahun 2024 adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggara pemerintahan Kecamatan Siantar Barat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Kepala daerah kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat, Walikota diwajibkan menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan mempublikasikan LPPD kepada masyarakat luas. Walaupun secara prinsip telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP No. 3 tahun 2007, tetapi tata cara penilaian kinerja dalam laporan ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Siantar Barat Tahun Anggaran 2024 ini menggunakan sistematika yang meliputi Pendahuluan, Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah, Hasil Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan, dan Penutup.

Berdasarkan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap 5 program diperoleh nilai rata-rata sebesar 93,96 %.
2. Hasil evaluasi terhadap 11 kegiatan/23 Sub kegiatan diperoleh nilai rata-rata sebesar 93,96 %.

Walaupun secara makro hasil evaluasi tingkat capaian kinerja cukup berhasil, bukan berarti bahwa tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2024. Secara jujur dan terbuka harus diakui masih terdapat beberapa kegiatan yang hasilnya kurang optimal dan belum dapat memenuhi semua harapan masyarakat, swasta dan pemerintah.

Pematang Siantar, Januari 2025
CAMAT SIANTAR BARAT



HERWAN AR. SARAGIH, SH
PENATA TK I
NIP. 19711225 200604 1 008